

PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN: DARI KONSEP HINGGA EVALUASI BERBASIS STANDAR KEBERHASILAN

Edi Ardihansa¹, Ummi Kalsum², Siradjuddin³, Alwan Suban⁴

^{1,2,3,4}UIN Alauddin Makassar

Email: ediardihansanuridin28@gmail.com¹, ummikalsum87@gmail.com², siradjuddin@uin-alauddin.ac.id³, alwan.suban@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengawasan anggaran pendidikan yang komprehensif, dengan memadukan elemen monitoring, pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, dan penggunaan standar keberhasilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari literatur dan laporan terkait pengawasan anggaran pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan pelibatan semua pemangku kepentingan, audit berkala, pelaporan transparan, serta evaluasi berbasis indikator keberhasilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integratif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan, sekaligus memperbaiki kinerja sektor pendidikan secara keseluruhan. Implikasi hasil penelitian ini adalah pentingnya implementasi kerangka pengawasan yang holistik untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pengawasan Anggaran Pendidikan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Indikator Keberhasilan

Abstract

This study aims to develop a comprehensive educational budget supervision framework by integrating monitoring, auditing, evaluation, reporting, and success indicators. The research employs a qualitative descriptive method through secondary data analysis from literature and reports related to educational budget oversight in Indonesia. The results indicate that effective supervision requires stakeholder involvement, periodic audits, transparent reporting, and evaluation based on success indicators. The study concludes that an integrative approach can enhance the transparency and accountability of educational budget utilization while improving overall education sector performance. The study's implications highlight the importance of implementing a holistic oversight framework to achieve national educational goals.

Keywords: Educational Budget Supervision, Monitoring, Evaluation, Reporting, Success Indicators

PENDAHULUAN

Anggaran pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembangunan sumber

daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, alokasi anggaran pendidikan telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD

1945, yang menyebutkan bahwa minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.(Umam, 2020) Namun, tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran pendidikan masih menjadi isu krusial. Dalam beberapa kasus, terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan alokasi dana tersebut.(Pramono, 2020) Fenomena ini menciptakan gap antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.

Pengawasan penganggaran pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan dana pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena dana yang dialokasikan akan menentukan keberhasilan berbagai program pendidikan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien, serta untuk

mencegah penyalahgunaan anggaran. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan anggaran pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan.(Pendidikan & Keuangan, 2024)

Pengawasan penganggaran pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa tujuan dari pengawasan anggaran pendidikan antara lain: **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengawasan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public; **Efisiensi dan Efektivitas:** Pengawasan dapat memastikan bahwa dana digunakan untuk program-program yang paling dibutuhkan dan dapat memberikan hasil yang maksimal; **Pencegahan Penyalahgunaan Dana:** Pengawasan dapat mengidentifikasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan, seperti korupsi dan pemborosan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan memerlukan langkah-langkah sistematis yang dimulai

dari monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan data secara terus-menerus untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan awal. Proses ini mencakup pelibatan semua pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. monitoring yang efektif dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.(Maulana, 2024)

Selanjutnya, pemeriksaan atau audit merupakan tahap penting dalam pengawasan anggaran pendidikan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan dana telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit bukan hanya sekadar mekanisme kontrol, tetapi juga alat untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan.(Purba, 2022)

Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan menjadi langkah lanjutan yang tidak kalah penting. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil dari penggunaan anggaran telah mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, apakah peningkatan alokasi dana berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan anggaran di masa depan.(Hibrida, 2014)

Proses pengawasan tidak akan lengkap tanpa adanya pelaporan anggaran pendidikan. Pelaporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah. Pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Selain itu, pelaporan juga memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dijalankan.(Arimbi Pamungkas1, 2022)

Aspek lain yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan standar keberhasilan dalam pengawasan anggaran pendidikan. Standar keberhasilan mencakup indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya, rasio antara alokasi anggaran dengan peningkatan angka partisipasi sekolah atau hasil ujian nasional. Penggunaan standar keberhasilan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja secara objektif.(Mulya & Rahaju, 2021)

Pengawasan anggaran pendidikan menjadi sangat relevan karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan dana yang terbatas dapat

dimanfaatkan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal, seperti peningkatan kualitas pengajaran, pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan pemerataan akses pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka pengawasan anggaran pendidikan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan saat ini, mengusulkan model pengawasan yang lebih efektif, dan memberikan rekomendasi untuk implementasinya di berbagai tingkat lembaga pendidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengawasan anggaran pendidikan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan dalam pengawasan anggaran pendidikan. Dengan memadukan konsep monitoring, pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, dan penggunaan standar keberhasilan, penelitian ini berupaya mengisi celah dalam kajian-kajian sebelumnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup seluruh proses pengawasan secara holistik untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

State of the art dalam penelitian ini mengacu pada penggabungan elemen-elemen pengawasan yang selama ini sering dikaji secara terpisah. Dengan mengintegrasikan monitoring, pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, dan standar keberhasilan, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam literatur pengawasan anggaran pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau studi kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka dengan tujuan untuk menganalisis pengawasan anggaran pendidikan di Indonesia. Lexy Moleong menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan teknik yang bertujuan memperoleh data melalui penelaahan bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku, artikel, jurnal ilmiah, maupun sumber elektronik yang kredibel (Lexy Moeleong, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur

dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta dokumen-dokumen kebijakan terkait pengawasan anggaran pendidikan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kemudian, sumber tersebut diteliti, dianalisis, di deskripsikan, di kembangkan, dan di inovasi dari penelitian sebelumnya. Selepas membaca dan mencatat temuan pokok sesuai fokus penelitian, tahap berikutnya adalah mengkaji temuan tersebut secara deskriptif untuk memperoleh makna rinci terkait fokus masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengawasan Anggaran Pendidikan

Pengertian Pengawasan Anggaran Pendidikan

Irfan Fahmi mendefinisikan Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah (daerah) berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaatnya untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai (Nova Merisa, 2023).

Pengawasan anggaran pendidikan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Penilaian (*grading*) adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Reporting (pelaporan) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi (Gunawan, 2020).

Pengawasan Anggaran pendidikan di sekolah merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat dan efektif dalam

meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dana pendidikan di sekolah meliputi meningkatkan transparansi, partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, pelatihan dan peningkatan keterampilan, menerapkan sistem pengawasan internal, dan melakukan audit eksternal secara berkala.

Urgensi Pengawasan Dana Pendidikan di Sekolah

Pengawasan Anggaran pendidikan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien (Nova Merisa, 2023). Ini menjadi suatu hal yang wajib untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan dana pendidikan sekolah; Pertama adalah membuat rencana pengeluaran yang jelas dan terperinci untuk setiap anggaran yang diberikan. Ini dilakukan biasanya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dalam tahap ini, pihak Lembaga sekolah harus memiliki kejelasan dari mana sumber dana yang diperoleh (Humas Universitas Islam An-Nur, 2023). Dengan begitu, perencanaan dapat menjadi matang sesuai kondisi dan kemampuan sekolah; Kedua adalah dengan

cara menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor penggunaan dana tersebut. Orang tersebut harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan sekolah; Ketiga adalah melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa dana yang dikelola telah digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Membuat laporan keuangan secara berkala untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar; Keempat adalah melakukan pengecekan berkala terhadap pembelian barang dan jasa, serta periksa kembali apakah pembelian tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti sistem keuangan berbasis komputer untuk mempermudah pelacakan dana pendidikan sekolah. Melibatkan orangtua siswa dan masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan sekolah. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Ramadhani & Nasrah; 2019).

Bentuk Pengawasan Pendanaan Pendidikan di sekolah

Bentuk pengawasan pendanaan pendidikan di sekolah antara lain berupa;

a) Pengawasan Umum: Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tupoksi unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan dinas pendidikan prov/kab/kota; b) Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media masa dan permintaan pemimpin unit kerja.; c) Pengawasan Tematik: Pemeriksaan dan pemantauan terhadap program-program tertentu yang menjadi isu nasional yang strategis; d) Pengawasan Mendadak: Pengawasan secara langsung terhadap unit kerja oleh unsur pimpinan; f) Pengawasan Dini: pengawasan terhadap program yang akan dan atau sedang berjalan (Suryana; 2021).

Pelaksana pengawas terdiri atas dua kelompok, yaitu; 1) Pengawas Eksternal, yaitu pengawas yang berasal dari luar pemerintah, yang meliputi DPR, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Independent lainnya; 2) Pengawas Internal pemerintah yang berasal dari lembaga pemerintah dan terdiri atas; Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/Kota (dari jajaran Badan Pengawas Daerah = BAWASDA), Badan Pengawas Yayasan, dan Komite Sekolah/Madrasah.

Dari segi akuntabilitas yang akan dicapai, ada tiga jenis audit; 1) Audit Kinerja, untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai sasaran program yang direncanakan guna memperoleh gambaran tingkat akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan. Ini dilakukan melalui pemeriksaan aspek atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi; 2) Audit Manajemen, untuk melihat seberapa jauh akuntabilitas pengelolaan program pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; 3) Audit Keuangan, yang melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dalam mendukung pelaksanaan dan manajemen program pendidikan yang telah direncanakan. Ini dilakukan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memberikan opini audit” (UU No.15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dan pasal 16)

Pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma: objektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan; terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; mendidik dan dinamis (Ramadhani & Nasrah; 2019).

Memonitoring Penggunaan Anggaran Pendidikan

Menurut Mudjahudin Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen proyek. Monitoring adalah rangkaian kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan durasi kegiatan rutin lebih pendek atau cepat daripada evaluasi, misalnya: mingguan, bulanan atau triwulanan (Yuli Ramadhan; 2019).

Untuk memonitor penggunaan anggaran pendidikan dengan efektif, diperlukan serangkaian langkah yang

sistematis dan terencana. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memonitor penggunaan anggaran pendidikan secara tepat dan efisien (Suyana & Sundaryo, 2021):

1. Menetapkan Sistem Pengelolaan Anggaran yang Transparan: a) Rencanakan alokasi anggaran secara jelas: Setiap anggaran yang dialokasikan harus disusun dengan rinci, mencakup kategori penggunaan dana seperti untuk gaji guru, pembangunan infrastruktur, pembelian alat pendidikan, dan program pengembangan lainnya; b) Buat anggaran yang terperinci: Tentukan rincian anggaran yang akan digunakan dalam berbagai sektor pendidikan agar bisa dipantau dengan jelas, misalnya dana untuk fasilitas, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler.
2. Dokumentasi dan Pencatatan Pengeluaran: a) Laporan pengeluaran berkala: Setiap unit pendidikan seperti sekolah atau universitas perlu membuat laporan berkala tentang penggunaan anggaran, baik harian, bulanan, atau tahunan. Ini dapat mencakup informasi tentang penggunaan dana

- untuk masing-masing program dan kegiatan; b) Dokumentasi yang lengkap: Semua pengeluaran harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup faktur, kuitansi, dan bukti lainnya yang sah untuk setiap transaksi pengeluaran anggaran.
3. Pemantauan Melalui Teknologi; a) Sistem manajemen anggaran digital: Gunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk memantau anggaran secara real-time, seperti software akuntansi atau aplikasi pelaporan anggaran pendidikan. Dengan teknologi, pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan transparan; b) Monitoring berbasis data: Sistem ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk memonitor penggunaan anggaran secara langsung, mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pemborosan lebih cepat, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dana.
 4. Audit Internal dan Eksternal; a) Audit internal: Setiap lembaga pendidikan perlu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan dana; b) Audit eksternal: Libatkan auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Audit ini dapat memberikan laporan yang obyektif dan independen mengenai penggunaan anggaran.
 5. Pemantauan oleh Pihak Terkait; a) Pengawasan oleh dinas pendidikan: Dinas pendidikan setempat atau lembaga pengelola pendidikan dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran di berbagai sekolah yang berada di bawah kewenangannya; b) Keterlibatan masyarakat dan stakeholder: Masyarakat dan orang tua juga bisa dilibatkan dalam pemantauan anggaran, misalnya dengan menyelenggarakan forum atau rapat yang membahas penggunaan dana pendidikan di sekolah (Azhar, 2019).

Pemeriksaan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Memeriksa penggunaan anggaran di pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dikelola oleh pihak sekolah digunakan secara efektif dan efisien, serta

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini tidak hanya untuk mengidentifikasi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa alokasi dana berkontribusi pada peningkatan kualitas Pendidikan (Darmawan & Arifin, 2018).

Dalam Proses pemeriksaan penggunaan anggaran Pendidikan, ada beberapa tahapan Langkah yang harus dilakukan, Berikut adalah langkah-langkah dalam memeriksa penggunaan anggaran di sekolah (Wulandari & Kartika, 2022):

1. Persiapan dan Perencanaan Pemeriksaan; 1) Tentukan Tujuan Pemeriksaan: Menentukan tujuan pemeriksaan, misalnya untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran; 2) Rencanakan Lingkup Pemeriksaan: Tentukan area yang akan diperiksa, seperti pengeluaran untuk kegiatan operasional, infrastruktur, pelatihan guru, pembelian buku, atau program pendidikan lainnya; c) Kumpulkan Dokumen yang Relevan: Persiapkan dokumen yang akan diperiksa, seperti: Rencana anggaran sekolah (RAPBS),

Laporan keuangan sekolah, Bukti pengeluaran (faktur, kwitansi, laporan pembayaran) dan Surat keputusan atau peraturan terkait anggaran pendidikan.

2. Memeriksa Alokasi dan Perencanaan Anggaran: a) Verifikasi Kesesuaian Alokasi Anggaran: Periksa apakah anggaran yang dialokasikan sudah sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah, seperti untuk kegiatan pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, dan program pengembangan lainnya; b) Cek Kesesuaian dengan Rencana Anggaran: Bandingkan alokasi anggaran yang tertuang dalam RAPBS dengan realisasi anggaran yang digunakan. Apakah dana digunakan sesuai dengan item-item yang sudah direncanakan; c) Pemeriksaan Prioritas Penggunaan Anggaran: Pastikan anggaran digunakan untuk prioritas yang telah disepakati, seperti kegiatan yang mendukung tujuan pendidikan (misalnya pelatihan guru, pembelian peralatan pendidikan, atau peningkatan infrastruktur).
3. Verifikasi Pengeluaran dan Pembayaran; 1) Memeriksa Bukti

- Pengeluaran: Cek bukti pembayaran seperti kwitansi, faktur, atau dokumen lain yang sah sebagai bukti transaksi keuangan sekolah. Setiap pengeluaran harus memiliki dokumen pendukung yang jelas dan valid; 2) Cek Kesesuaian Pengeluaran dengan Anggaran: Verifikasi bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, baik dalam jumlah maupun jenis pengeluaran. Misalnya, apakah pengeluaran untuk pembelian barang sesuai dengan jenis barang yang direncanakan (misalnya peralatan belajar); 3) Kepatuhan Terhadap Prosedur Pengadaan: Periksa apakah prosedur pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti melalui tender atau seleksi yang transparan jika diperlukan.
4. Audit Kinerja Penggunaan Anggaran;
- a) Evaluasi Dampak Penggunaan Anggaran: Lakukan evaluasi terhadap dampak dari penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan, misalnya apakah program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi proses pembelajaran atau pengembangan sekolah;
 - b) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran: Periksa apakah penggunaan anggaran dilakukan secara efisien (dana digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan) dan efektif (dana menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan);
 - c) Pantau Realisasi Anggaran: Lakukan pemantauan untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan tidak melebihi batas yang telah disetujui, dan tidak ada pengeluaran yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
5. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas;
- 1) Periksa Laporan Keuangan: Tinjau laporan keuangan sekolah, termasuk neraca dan laporan laba rugi, untuk melihat apakah laporan tersebut mencerminkan penggunaan anggaran yang sesuai dan tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan dana;
 - 2) Cek Transparansi dalam Penyampaian Laporan: Pastikan laporan keuangan dan penggunaan anggaran disampaikan kepada pihak terkait, seperti komite sekolah, dinas

- pendidikan, atau orangtua siswa, agar dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan; 3) Keterlibatan Stakeholder: Pastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orangtua siswa, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
6. Pemantauan dan Tindak Lanjut; a) Pemantauan Penggunaan Anggaran: Lakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan anggaran di sekolah. Ini bisa berupa pemeriksaan periodik atau audit internal untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyelewengan dalam pengelolaan dana; b) Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan: Jika ditemukan masalah atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, lakukan evaluasi dan tindak lanjut yang diperlukan, seperti perbaikan prosedur pengelolaan anggaran atau pelatihan bagi pengelola anggaran di sekolah; c) Rekomendasi Perbaikan: Berikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan selama pemeriksaan, baik itu terkait dengan proses administrasi, pengelolaan keuangan, atau prosedur pengadaan barang dan jasa.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan; 1) Laporan Temuan: Setelah pemeriksaan selesai, buat laporan yang mencakup temuan-temuan hasil pemeriksaan, baik yang positif maupun yang memerlukan perbaikan; 2) Rekomendasi: Sertakan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran sekolah, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, atau penguatan prosedur pengawasan keuangan; 3) Penyampaian Laporan: Sampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan.
8. Implementasi Rekomendasi dan Pemantauan Perbaikan; a) Tindak Lanjut Implementasi: Pastikan rekomendasi dari pemeriksaan dilaksanakan dengan tepat oleh pihak sekolah; b) Pemantauan Proses Perbaikan: Lakukan pemantauan terhadap implementasi perbaikan yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran di masa depan menjadi lebih efisien

dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Evaluasi Anggaran Pendidikan

Evaluasi anggaran pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.(Aziz & Zakir, 2022) Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan di sektor pendidikan.(Meity Sumual et al., 2024) Evaluasi anggaran bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Netriwinda et al., 2022)

Evaluasi anggaran pendidikan biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan(Handoko & Tukiran, 2022) meliputi : (1) Pengumpulan data terkait pelaksanaan anggaran, seperti laporan keuangan, realisasi anggaran, dan capaian program, dikumpulkan untuk dianalisis(Basri, 2013). (2) Analisis kinerja keuangan, realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran untuk menilai efektivitas penggunaan dana(Dien et al., 2015). (3) Pengukuran Capaian Program. melalui indikator-indikator kinerja, evaluasi

dilakukan terhadap pencapaian program yang dibiayai anggaran, baik dari segi output (hasil langsung) maupun outcome (dampak jangka panjang)(Dien et al., 2015). (4) Identifikasi masalah dan rekomendasi; dari hasil evaluasi ada masalah-masalah yang ditemukan dirumuskan, diikuti dengan rekomendasi perbaikan untuk perencanaan anggaran di masa mendatang(Arifah, 2018).

Proses evaluasi anggaran mencakup:

(1) Penilaian terhadap output dan outcome dari kegiatan yang didanai: Penilaian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Output mengacu pada produk langsung dari kegiatan, seperti jumlah kelas yang direnovasi atau siswa yang menerima beasiswa. Sementara itu, outcome mengukur dampak yang lebih luas, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah atau kualitas pembelajaran(Ananda & Rafida, 2017). (2) Perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana; langkah ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan awal. Penyimpangan atau perbedaan signifikan antara rencana dan realisasi perlu diidentifikasi dan dianalisis penyebabnya(Prasetia et al.,

2024). (3) Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran; evaluasi harus mencakup analisis terhadap faktor internal (seperti manajemen anggaran dan kompetensi pengelola) maupun eksternal (seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah) yang memengaruhi hasil pelaksanaan anggaran(Pradila et al., 2024).

Evaluasi anggaran pendidikan merupakan langkah esensial dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Jannah, 2024). Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh, diharapkan pengelolaan anggaran pendidikan menjadi lebih baik, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan sektor pendidikan(Yusuf et al., 2023). Evaluasi yang komprehensif membantu pengelola anggaran untuk menyusun strategi yang lebih baik di masa depan(Cerdas et al., n.d.). Selain itu, evaluasi anggaran pendidikan ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait alokasi sumber daya(Putri, 2024).

Pelaporan Anggaran Pendidikan

Pelaporan anggaran adalah bagian penting dalam sistem akuntabilitas

keuangan, termasuk di sektor pendidikan. Proses pelaporan ini mencakup penyusunan, penyampaian, dan pengungkapan informasi terkait penggunaan anggaran pendidikan secara sistematis(Kisworo & Shauki, 2019). Laporan anggaran harus disusun secara terstruktur, transparan, dan akurat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana pendidikan dialokasikan, digunakan, dan sejauh mana pencapaian program yang didukung oleh anggaran tersebut(Untuk et al., 2024).

Komponen utama laporan anggaran pendidikan meliputi: (1) Pendapatan; menggambarkan sumber dana pendidikan, baik dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, maupun sumber lain seperti sumbangan masyarakat. (2) Alokasi anggaran; rincian bagaimana anggaran dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, gaji guru, atau pelatihan tenaga pendidik. (3) Realisasi anggaran; menunjukkan sejauh mana anggaran telah digunakan dibandingkan dengan rencana awal. (4) Capaian program; memuat indikator-indikator keberhasilan program yang didanai anggaran, seperti jumlah sekolah yang dibangun, peningkatan akses

pendidikan, atau hasil ujian siswa. (5) Catatan dan rekomendasi; menyajikan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.(Muspawi & Lukita, 2023)

Pelaporan yang baik mencakup beberapa komponen utama berikut: (1) Rincian alokasi dan realisasi anggaran. Laporan harus memuat informasi yang jelas tentang jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan dan realisasinya. Data ini membantu memastikan bahwa dana telah digunakan sesuai dengan peruntukannya(Pramita, 2015). (2) Penjelasan mengenai penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Jika terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan, laporan harus menjelaskan penyebabnya. Misalnya, keterlambatan pelaksanaan program, perubahan prioritas, atau kendala teknis lainnya(Siswantari et al., 2019). (3) Rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan. Berdasarkan analisis terhadap data anggaran, laporan harus memberikan saran konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di masa mendatang. Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa kesalahan atau kelemahan yang

terjadi tidak terulang kembali.(Syarifuddin et al., 2024)

Pelaporan yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya pelaporan yang transparan, semua pihak terkait, seperti manajemen sekolah, pemerintah, dan masyarakat, dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara lebih efektif.(Hajizah, 2024)

Pelaporan anggaran pendidikan adalah alat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan menyusun laporan yang terstruktur, transparan, dan akurat, para pemangku kepentingan dapat menilai keberhasilan pengelolaan anggaran serta merancang langkah-langkah perbaikan untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan secara berkelanjutan.(Tanjiah et al., 2024)

Penggunaan Standar Keberhasilan dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan

Standar keberhasilan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Standar keberhasilan adalah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan anggaran pendidikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Standar ini penting karena memberikan arah yang jelas untuk evaluasi, memastikan bahwa anggaran pendidikan dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.(Utama & Setiyani, 2014)

Standar keberhasilan dalam pengawasan anggaran pendidikan(Umam, 2020) mencakup aspek-aspek berikut : (1) Tingkat pencapaian tujuan pendidikan; standar ini mengukur sejauh mana program atau kegiatan yang didanai anggaran telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah atau peningkatan kualitas pembelajaran.(Akbar et al., 2018) (2) Proporsi realisasi anggaran terhadap alokasi; rasio antara anggaran yang direalisasikan dengan anggaran yang dialokasikan menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi penggunaan dana. Penyimpangan yang signifikan harus

diidentifikasi dan dianalisis penyebabnya.(Pamungkas et al., 2023) (3) Kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan prioritas: Standar ini memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar mendukung program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.(Makwa & Nafsiah, 2022)

Langkah-langkah menyusun standar keberhasilan dalam pengawasan anggaran pendidikan(Umam, 2020) yaitu dengan: (1) Identifikasi tujuan program; memastikan bahwa tujuan program pendidikan telah dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). (2) Tentukan indikator keberhasilan dengan menetapkan indikator yang sesuai untuk setiap tujuan, seperti angka partisipasi, capaian pembelajaran, atau efisiensi biaya. (3) Konsultasi dengan pemangku kepentingan dengan melibatkan pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun standar keberhasilan agar dapat mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. (4) Monitoring dan penyesuaian dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa standar keberhasilan

tetap relevan dan realistis sesuai dengan kondisi yang ada.

Komponen utama dalam standar keberhasilan meliputi; 1) Efektivitas program; tentang sejauh mana tujuan program pendidikan tercapai, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Contohnya jika tujuan program adalah meningkatkan angka partisipasi siswa hingga 90%, standar keberhasilannya adalah tercapainya target tersebut.(Muiz et al., 2024) 2) Efisiensi penggunaan anggaran; perbandingan antara hasil yang dicapai dan biaya yang dikeluarkan. Anggaran harus digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Contohnya; jika anggaran digunakan untuk membangun sekolah, maka efisiensi dapat diukur dengan biaya per unit bangunan yang dihasilkan dibandingkan dengan rata-rata nasional.(DITA ANJANI PURBA.Pdf, n.d.) 3) Pemerataan akses berupa penyediaan pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan kelompok rentan. Contohnya standar keberhasilan dapat berupa berkurangnya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.(Yulianita, n.d.) 4) Kualitas Pendidikan dengan peningkatan hasil

pembelajaran siswa, kompetensi guru, dan mutu fasilitas pendidikan. Contohnya meningkatnya nilai ujian AMBK rata-rata atau persentase siswa yang lulus ujian akhir sekolah dengan nilai terbaik.(Keguruan et al., 2018) 5) Akuntabilitas dan transparansi dengan pelaporan keuangan yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya laporan anggaran pendidikan yang diaudit secara independen dan sesuai dengan standar akuntansi.(Fierda Shafratunnisa, 2019)

Dengan adanya standar keberhasilan, pengawas dapat: (1) mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, seperti program yang kurang efektif atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, (2) memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan di masa mendatang, dan (3) membantu memastikan bahwa penggunaan anggaran selalu berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.(Febrianti et al., 2024)

Standar keberhasilan adalah alat penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan menetapkan standar

yang jelas dan relevan, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal

KESIMPULAN

Pengawasan Penggunaan Anggaran pendidikan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dana pendidikan meliputi meningkatkan transparansi, partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, pelatihan dan peningkatan keterampilan, menerapkan sistem pengawasan internal, dan melakukan audit eksternal secara berkala, pelaporan transparan, serta evaluasi berbasis indikator keberhasilan.

Pemeriksaan atau audit merupakan tahap penting dalam pengawasan anggaran pendidikan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan dana telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit bukan hanya sekadar mekanisme

kontrol, tetapi juga alat untuk meningkatkan kinerja organisasi pendidikan.

Evaluasi penggunaan anggaran pendidikan menjadi langkah lanjutan yang tidak kalah penting. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil dari penggunaan anggaran telah mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, apakah peningkatan alokasi dana berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan anggaran di masa depan.

Proses pengawasan tidak akan lengkap tanpa adanya pelaporan anggaran pendidikan. Pelaporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah. Pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Selain itu, pelaporan juga memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dijalankan.

Aspek lain yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan standar keberhasilan dalam pengawasan anggaran pendidikan. Standar keberhasilan mencakup indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya, rasio antara alokasi anggaran dengan peningkatan angka partisipasi sekolah atau hasil ujian nasional. Penggunaan standar keberhasilan dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. (2019). "Efektivitas Pengawasan Anggaran Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(1), 45-56.
- Akbar, M. F., Suprpto, S. H., & Mohi, W. K. (2018). Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo). *Aristo*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. In *Perdana Publishing* (Vol. 53, Issue 9).
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Arimbi Pamungkas1, A. T. (2022). Attractive : Innovative Education Journal. *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability*, 4(1), 1–12.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Strategi Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsMathla'ul Huda Cikande Karawang. *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(3), 1030–1037.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Cerdas, S., Efektif, D. A. N., & Anda, M. K. (n.d.). *PENGELOLAAN PERENCANAAN KEUANGAN*.
- Darmawan, A., & Arifin, A. (2018). "Pengawasan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Sekolah." *Jurnal Manajemen Keuangan Pendidikan*, 5(4), 68-76.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- DITA ANJANI PURBA.pdf. (n.d.).

- Febrianti, A., Fauzi, L. M., & Kushartono, T. (2024). *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung*. 24(3), 2265–2272. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5617>
- Fierda Shafratunnisa. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di Sd Islam Binakheir. In *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29717>
- Gunawan, I. (2020). "Peran Pengawasan Anggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(3), 221-230
- Hajizah, A. (2024). Penerapan User Experience Dalam Permodelan Sistem Informasi Keuangan. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS)*, 2(1), 1–11.
- Handoko, C., & Tukiran. (2022). Manajemen Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 8(2), 8.
- Hibrida, A. R. (2014). *Studi Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember Tahun 2013* (Vol. 2013). [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61477%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61477/Anas Romzy Hibrida - 070910201090.pdf%0Asequence=1](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61477%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61477/Anas%20Romzy%20Hibrida%20070910201090.pdf%0Asequence=1)
- Jannah, S. N. (2024). *Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 1, 30–36.
- Keguruan, F., Ups, P., Daya, M., & Bangsa, S. (2018). *Prosiding Srada (Seminar Literasi Pedagogi)*. 11–22.
- Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian Dan Lembaga Negara Di Indonesia). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.157>

- Merisa, N., & Bela Safitri. (2023). "Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah." *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1 (1), 81-88S
- Makwa, S., & Nafsiah, S. N. (2022). Analisis Kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019 dan 2020 Pada UPTD SMPN 2 Pangkalanbaru. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 124–134. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9373>
- Maulana, M. M. (2024). *Integrasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan standar mutu pengelolaan pendidikan di sekolah. VIII(2)*, 304–315.
- Meity Sumual, S. D., Meyske Wongkar, M., Harry Mossey, S., & Pagawak, D. (2024). Implementasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Journal on Education*, 6(4), 18609–18619. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5824>
- Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). *Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas , Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi*. 2(4), 46–64.
- Mulya, M. H. W., & RAHAJU, T. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181–194. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Netriwinda, Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Paud Holistik Integratif Dengan Model Cipp Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh. *Jurnal Inovasi Pendidikan (JIP)*, 2(8), 2343–2352. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1115>
- Pamungkas, E. W., Nurchyanti, D. D., Nurhayati, D., Nugraha, N., Putuhena, H., Usman, D. E., Astuti, T. D., Dewanti, M. A., Anggaraini, F. D., & Indarto, S. L. (2023). *AKUNTANSI MANAJEMEN (Teori & Konsep-konsep Dasar Akuntansi*

- Manajemen Terkini*) (Issue June).
www.sonpedia.com
- Pendidikan, K., & Keuangan, P. (2024).
Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. 4, 1723–1732.
- Pradila, Y., Astuty, W., & Hanum, Z. (2024).
Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. 4(1), 2289–2320.
- Pramita, Z. E. (2015). *Evaluasi realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Mojorejo 02 Kec. Wates, Kab. Blitar*.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/3003%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/3003/1/11520024.pdf>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Prasetya, D., Saladin, H., & Nurmala, N. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung (OKI). *ECO-Fin*, 6(2), 441–451.
<https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1172>
- Purba, et al. (2022). : *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Yahfizham* : (Vol. 09, Issue 1).
- Putri, N. J. (2024). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 634–643.
- Ramadhani, Y., & Nasrah. (2019). “*Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kantor Dinas Pendidikan Soping*.” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2 (2), 42-51.
- Suryana, S., & Sundaryo, M. (2021). "Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 129-140.
- Siswantari, Fajarini, C. D., & Suryawati, D. (2019). *Penyimpangan dana alokasi khusus bidang pendidikan*.
https://repositori.kemdikbud.go.id/18042/1/Final_Cetak_07_Penyimpangan_DAK.pdf

- Syarifuddin, S., Rahmattullah, R., & Akmaluddin, A. (2024). Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar. *Visipena*, 53–74. <https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/2556%0Ahttps://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/download/2556/1552>
- Tanjiah, A., Mukti, S., & Dhiaulhaq, F. (2024). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SLB Darma Putra Kalipucang*. 2(2), 195–203. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i2.577>
- Umam, M. K. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8, 61–74. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/141>
- Untuk, D., Tugas, M., Pada, T., Kuliah, M., & Pendidikan, M. P. (2024). *Makalah anggaran penddikan*.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU Daniel Aditya Utama 1 Rediana Setiyani 2. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9(2), 100–114.
- Yulianita, A. (n.d.). *Ekonomi pembangunan*.
- Yusuf, M., Sodik, M., Darussalam, S., Nganjuk, K., & Blitar, U. (2023). Penggunaan Teknologi Internet of Things (Iot) Dalam Pengelolaan Fasilitas Dan Infrastruktur Lembaga Pendidikan Islam. *PROPHETIK Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2), 1–18.
- Wulandari, N., & Kartika, P. (2022). "Pengawasan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran." *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 10(2), 112-121